

Hasil Penelitian Kelompok

**PERSEPSI DOSEN PERGURUAN TINGGI ISLAM
DI KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG ZAKAT PROFESI**



Peneliti:

- 1. Dra. Hj.ST. RAHMAH, M.Si**
- 2. TRI HIDAYATI, SHL., M.H.**
- 3. Drs. SURYA SUKTI, MA**

**PENELITIAN KELOMPOK DOSEN JURUSAN SYARIAH
STAIN PALANGKA RAYA
TAHUN 2013**

Hasil Penelitian Kelompok

**PERSEPSI DOSEN PERGURUAN TINGGI ISLAM
DI KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG ZAKAT PROFESI**



Peneliti:


- 1. Dra. Hj.ST. RAHMAH, M.Si**
- 2. TRI HIDAYATI, SHI., M.H.**
- 3. Drs. SURYA SUKTI, MA**

**PENELITIAN KELOMPOK DOSEN JURUSAN SYARIAH
STAIN PALANGKA RAYA
TAHUN 2013**

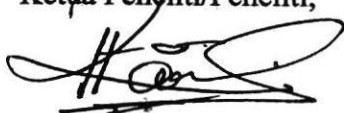
LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Fungsi dan Wewenang Badan Amil Zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Palangka Raya)
b. Bidang Ilmu : Hukum Islam/Fiqih
c. Kategori Penelitian : Penelitian Kualitatif
2. Ketua Peneliti
a. Nama : Dra. ST. Rahmah, M.Si
b. NIP : 19560725 199003 2 001
c. Jenis Kelamin : Perempuan
d. Pangkat/Gol/NIP : Lektor Kepala (IV/a)
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
Nama Anggota Peneliti : 1. Drs. Surya Sukti, M.A
2. Tri Hidayati, SHI., MH.
4. Lokasi Penelitian : Kota Palangka Raya
5. Lama Penelitian : 7 Bulan (Juni-Desember 2013)


Mengetahui:
Kepala P3M STAIN Palangka Raya


Rahmadi Nirwanto, M.Pd
NIP. 197001312002121002

Palangka Raya, 20 Desember 2013
Ketua Peneliti/Peneliti,


Dra. ST. Rahmah, M.Si
NIP. 195607251990032001

Disahkan oleh:
Ketua STAIN Palangka Raya,


Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH., MH.
NIP. 197501091999031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, puji syukur atas limpahan rahmat dan petunjuk Allah SWT. penelitian kami yang berjudul: "PERSEPSI DOSEN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ZAKAT PROFESI" dapat dirampungkan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini merupakan wujud pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya tahun 2013 dalam rangka pengembangan keilmuan khususnya di bidang Hukum Islam.

Dalam kesempatan ini, kami haturkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan demi lancarnya proses penelitian ini, kepada: Ketua STAIN Palangka Raya, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Palangka Raya, dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya baik secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu kelancaran penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan evaluasi atas penerapan hukum zakat profesi di Kota Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberkahi segala amal ibadah kita, amin.

Palangka Raya, 20 Desember 2013

Peneliti,



Dra. ST. Rahmah, M.Si
NIP. 195607251990032001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dosen Perguruan Tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang status hukum dan nishab zakat profesi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian terhadap dosen STAIN Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya ini adalah: 1. Persepsi dosen terhadap status hukum zakat profesi terbagi 3 (tiga) kelompok yang menganggap bahwa zakat profesi: a. hukumnya wajib; b. hukumnya belum jelas karena masih ikhtilaf; dan c. belum tahu hukumnya karena tidak mendalami. 2. Persepsi dosen tentang nishab zakat profesi terbagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu: a. Nishabnya seperti emas dengan haul; b. Nishabnya dengan zakat pertanian dan kadar zakatnya seperti zakat emas; c. Nishabnya seperti zakat perdagangan; dan d. nishabnya seperti zakat emas tanpa terikat haul.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka / Kajian Terdahulu	9
BAB II KERANGKA TEORI	13
A. Persepsi	13
B. Pengertian Dosen	15
C. Zakat profesi	15
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Objek dan Subjek Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Lokasi Penelitian	36

B. Persepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam di Kota Palangka Raya	
Tentang Status Hukum Zakat Profesi	44
C. Persepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam di Kota Palangka Raya	
Tentang Nishab Zakat Profesi.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat, dan merupakan ibadah yang bertalian dengan harta benda. Menurut Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Hafidhuddin, bahwa zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (harta dan sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan.¹ Karena itu, ibadah ini memegang peranan yang sangat penting dan menentukan untuk membantu perkembangan dan kemajuan masyarakat, khususnya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah yang hidupnya masih berada di bawah taraf garis kemiskinan, dalam usaha meningkatkan kualitas hidup mereka menuju taraf kehidupan yang lebih baik, yakni kehidupan yang dicita-citakan oleh masyarakat, yang oleh kalangan Islam disebut dengan istilah *Baldat al-tayyibat wa rabb al-gafur*, yaitu suatu masyarakat yang baik atau tempat sejahtera di dunia di bawah naungan, keampunan dan keridaan Allah.

Harapan ini bisa diwujudkan, karena zakat selain mempunyai dimensi kesalehan kepada Allah (*habl min Allah*) juga mempunyai dimensi sosial (*habl min al-naas*). Ajaran zakat menuntut supaya orang-orang kaya dapat membantu orang-orang miskin dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka sehari-hari. Bantuan itu bisa dalam bentuk bantuan langsung,

¹ Didin Hafidhuddin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, hlm.1

maupun dengan memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka.

Allah Swt. mensyari'atkan zakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat secara merata. Selain itu, zakat juga mempunyai tujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dari bermacam-macam sifat tercela, seperti sifat kikir dan egois, sekaligus untuk membersihkan dan mensucikan harta dari berbagai syubhat.

Pada zaman sekarang, masih ada sebagian kaum muslimin memahami masalah zakat dengan pemahaman klasik. Pembahasan zakat masih terfokus pada pembahasan fiqh yang memandangnya sebagai masalah ritual semata (*ibadah mahdhah*) dan statis, dan belum menyentuh pada masalah-masalah sosial seperti yang berkembang sekarang ini.

Kategori orang kaya menurut pemahaman klasik, adalah orang-orang yang sudah memiliki harta yang cukup senisab. Nisab adalah ukuran yang menjadi batas minimal kepemilikan harta yang sudah wajib dibayarkan zakatnya, yaitu jika telah memiliki sapi 30 ekor, atau memiliki kambing 40 ekor, atau memiliki unta 5 ekor, atau memiliki gandum, beras, jagung, kurma dan anggur sebanyak 5 wasaq, atau memiliki emas 20 dinar/misqal atau perak murni sebanyak 200 dirham. Hal itu dapat dipahami, karena sektor ekonomi yang mendominasi masyarakat zaman klasik adalah sektor peternakan, pertanian, perkebunan dan perniagaan yang menggunakan standar emas dan perak.²

² <http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/> 18 Januari 2011

Hasil profesi atau hasil kerja seperti pegawai negeri dan swasta, dokter, pengacara, konsultan, notaris dan sebagainya belum dikenal di zaman klasik sebagai suatu sumber penghidupan yang menjanjikan kesejahteraan. Dengan demikian Ulama Salaf tidak banyak mempersoalkan masalah-masalah yang berhubungan dengan profesi dan hasil kerja tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah zakat. Lain halnya dengan bentuk-bentuk *kasab* tradisional seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perniagaan yang sudah populer di masyarakat zaman itu, maka bidang-bidang ini telah mendapat perhatian para Ulama sehingga mendapat porsi pembahasan lebih luas yang dituangkan dalam kitab-kitab mereka.

Pada era globalisasi sekarang ini, zakat profesi³ adalah salah satu wacana yang tengah hangat didiskusikan dan diperkenalkan selama beberapa dekade terakhir ini. Walaupun demikian, sebagian masyarakat masih mempertanyakan legalitas zakat profesi tersebut. Mereka yang menentang penerapan syariat zakat profesi ini beranggapan bahwa zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat Islam dan merupakan hal baru yang diada-adakan.

Ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili melakukan pembahasan terhadap bentuk-bentuk *kasab* di bidang jasa seperti dokter, pengacara, konsultan, notaris,

³ Profesi dari kata *profession* yang artinya pekerjaan. Profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Jika kata profesi dikaitkan dengan zakat maka berarti zakat yang dikenakan atas tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang telah memenuhi nisab. Penghasilan atau pendapatan yang seperti ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai al-maal al-mustafaad. Lihat Hafidhuddin, dalam *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 93

seniman, artis, pegawai negeri atau swasta dan sebagainya dan mengaitkannya dengan kewajiban zakat. Tampaknya struktur masyarakat kaya dan miskin saat ini mengalami perubahan mendasar. Kata “*amwal*” atau “harta” dipahami oleh orang Arab zaman klasik adalah binatang ternak yang banyak atau lahan pertanian yang luas. Dengan demikian orang kaya adalah orang yang banyak memiliki binatang ternak. Sekarang orang kaya bukan hanya orang yang memiliki binatang ternak yang banyak atau memiliki lahan ratusan hektar, tetapi para pejabat tinggi negara, pemimpin perusahaan, pemimpin partai politik dan pekerja-pekerja profesional yang memperoleh harta yang banyak.⁴

Mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi. Bahkan, zakat profesi telah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan (tanggal 6 Rabiul Akhir 1424 H/ 7 Juni 2003 M) dan secara hukum positif telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa pendapatan dan jasa (profesi, *pen*) termasuk sebagai objek zakat. Oleh karena itu, setiap penghasilan, apapun jenis pekerjaan yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab. Pekerjaan itu antara lain Dokter, Pegawai Negeri Sipil, Akuntan, Konsultan, Artis, Entrepreneur dan sebagainya. Hal

⁴ [http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/18 Januari 2011](http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/18%20Januari%202011)

tersebut didasarkan pada keumuman firman Allah swt: dalam QS Al Baqarah (2) :267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّن
الْأَرْضِ ط

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." ⁵

Zakat profesi merupakan suatu konsekuensi nyata, yang jika ditunaikan oleh semua *muzakki*, maka niscaya akan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu masyarakat yang sejahtera dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan melalui pembangunan sosial ekonomi dengan memprioritaskan orang-orang miskin.

Dalam Islam, terpenuhinya kebutuhan pokok hidup manusia adalah sangat penting sebagai indikator kesejahteraan manusia dan sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh karena itu, pengetahuan, pemahaman dan aktualisasi keimanan dan ketaatan para *muzakki* terhadap perintah zakat khususnya zakat profesi untuk mewujudkan tujuan zakat yakni sebagai media distribusi kekayaan dari golongan orang yang mampu / kaya (*the have*) kepada golongan orang yang tidak mampu /miskin (*the have not*),

⁵ Departemen Agama RI, 2005. *Al Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, hlm.67

sebagai salah satu solusi dalam rangka mewujudkan cita-cita menuju pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun seperangkat aturan fiqh dan hukum positif telah tersedia, pencapaian tujuan pengembangan potensi zakat profesi tersebut akan sangat tergantung pada persepsi dan aktualisasi keimanan dan ketaatan para profesional yang menjadi objek perintah zakat profesi itu sendiri. Semakin banyak jumlah pekerja profesional di suatu daerah diharapkan menjadi potensi besar bagi tercapainya perolehan dan pendayagunaan zakat untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki berbagai macam jenis pekerjaan mulai instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, hingga swasta yang dapat dikategorikan sebagai profesi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya bahwa perolehan zakat profesi dari muzakki masih sangat minim, misalnya tahun 2012 hanya 2 orang muzakki yang menyetor zakat profesi dengan nilai Rp. 1.143.750,- dan pada tahun 2013 bulan Januari hingga Juni 2013 hanya 1 orang muzakki zakat profesi dengan nilai Rp. 200.000,-.⁶ Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat banyaknya jumlah para pekerja profesi di Kota Palangka Raya yang tergolong muzakki.

Salah satu sasaran perintah zakat profesi yang perlu disoroti diantaranya para dosen di Perguruan Tinggi Islam yang ada di Kota Palangka Raya yang juga memperoleh penghasilan berupa gaji maupun insentif (honor)

⁶ Laporan kegiatan BAZDA Kota Palangka Raya Tahun 2012 dan 2013

setiap bulannya. Perguruan Tinggi Islam yang memiliki fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian) tentunya menjadi wadah pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan peradaban Islam berbasis lokal. Sumbangsih pemikiran, pemahaman, dan pengabdian para dosen sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian pada masyarakat sedikit banyak turut serta mempengaruhi pemikiran, pemahaman, dan sikap aktualisasi masyarakat terhadap ajaran agama Islam itu sendiri, terkhusus dalam persoalan zakat profesi.

Atas dasar pemikiran inilah, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan formulasi judul: PERSEPSI DOSEN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG ZAKAT PROFESI.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok masalah mengenai persepsi dosen perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang zakat profesi. Masalah ini dirinci ke dalam sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi dosen perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang status hukum zakat profesi ?
2. Bagaimana persepsi dosen perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang nisab zakat profesi ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi dosen perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang hukum zakat Profesi.
2. Untuk mengetahui persepsi dosen perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang nisab zakat profesi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif antara lain:

- a. Sebagai media informasi dan pendalaman pemahaman penulis tentang zakat profesi;
- b. Sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi para pendakwah dalam menyampaikan dan untuk lebih gencar mensosialisasikan materi zakat profesi kepada masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya;
- c. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi pemerintah, BAZDA Kota Palangka Raya, maupun Lembaga Amil Zakat lainnya untuk strategi peningkatan penggalan potensi zakat profesi di Kota Palangka Raya;
- d. Sebagai bahan bagi para penstudi terhadap penelitian-penelitian sejenis tentang zakat profesi.

E. Tinjauan Pustaka / Kajian Terdahulu

Sepanjang yang penulis ketahui bahwa penelitian tentang zakat profesi sudah dilakukan oleh berbagai kalangan dan di antaranya telah diteliti oleh Endrawati Nurwiyani dan Henny Suciatty. Keduanya adalah alumni Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana dari Universitas Diponegoro Semarang. Endrawati Nurwiyani dalam tesisnya yang berjudul *Urgensi*

Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung, menyatakan bahwa kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kemakmuran di kalangan umat Islam, disebabkan karena : pertama, kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang disamakan dengan shalat. Kedua, kurangnya pengertian umat tentang tata pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dicontohkan melalui lembaga amilin yang digariskan Allah SWT. dalam al-Quran. Berdasarkan hal tersebut, beliau memfokuskan penelitiannya tentang pelaksanaan komunikasi hukum zakat profesi di kabupaten Temanggung, kesadaran hukum akibat pelaksanaan komunikasi hukum zakat profesi, serta model ideal komunikasi hukum dalam rangka pengelolaan zakat profesi di kabupaten Temanggung.⁷

Sedangkan Henny Suciaty dalam tesisnya yang berjudul *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya di Kota Semarang* menyatakan bahwa pada zaman dahulu, di antara pekerjaan yang dapat membuat orang menjadi kaya adalah berdagang, bertani dan beternak. Sebaliknya di zaman sekarang, berdagang, bertani dan beternak tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya. Bahkan pada umumnya petani dan peternak di Indonesia termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya serba kekurangan. Profesi-profesi tertentu di zaman dulu memang sudah ada,

⁷ Endrati Nurwiyani, 2009. *Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 4

tapi dari sisi pemasukan, tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar dan membuat pelakunya kaya raya. Di zaman sekarang ini terjadi perubahan, justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti dokter spesialis, arsitek, komputer programmer, pengacara dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

Profesi-profesi tersebut dapat mendatangkan rezeki yang luar biasa besarnya bahkan dalam waktu yang amat singkat. Karena itu, ketentuan zakat untuk para profesional tersebut harus ditinjau ulang, tidak secara otomatis menggunakan ketentuan lama yang hanya 2,5 persen, tapi prosentase zakatnya perlu ditingkatkan, paling tidak antara sepuluh sampai dua puluh persen.

Perubahan sosial inilah yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk melihat kembali cara pandang dalam menentukan siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin di zaman ini. Di zaman dahulu, orang kaya identik dengan pedagang, petani dan peternak. Tapi di zaman sekarang ini, orang kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Walaupun zaman telah berubah, namun prinsip zakat tidak berubah, yakni zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang yang miskin. Berdasarkan hal tersebut, Henny Suciaty memfokuskan penelitiannya tentang Kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pemanfaatan zakat

profesi untuk kesejahteraan umat di kota Semarang, serta Hambatan pelaksanaan zakat profesi di masyarakat di kota Semarang.⁸

Kedua peneliti tersebut di atas mengakui betapa pentingnya zakat profesi dalam mengatasi kemiskinan, karena itu harus dikelola dengan baik. Namun suatu hal yang perlu dikritisi bahwa zakat profesi belum dikenal secara luas oleh masyarakat karena jenis zakat ini tergolong inovasi baru dalam khasanah pemikiran fiqh dan tentunya masyarakat pun memiliki pengetahuan dan pemahaman yang beragam terhadap zakat profesi tersebut.

Dalam hal ini, Perguruan tinggi Islam sebagai pengemban tri dharma perguruan tinggi tentunya dapat menjadi wadah pengkajian dan pengembangan pemikiran hukum Islam, salah satunya tentang zakat profesi. Pengkajian dan pengembangan tersebut tidak lepas dari keterlibatan para dosen di perguruan tinggi Islam itu sendiri. Dalam tugasnya, para dosen terutama yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Dosen Tetap Yayasan memperoleh penghasilan berupa gaji maupun insentif lainnya yang nilainya boleh jadi telah mencapai nisab sehingga termasuk dalam kategori muzakki. Untuk itulah, penulis memandang bahwa para muzakki seperti para dosen perguruan tinggi Islam inilah salah satu *point center* sosialisasi, baik sebagai objek terlebih menjadi subjek perintah zakat profesi ini, karena pengetahuan, pemahaman, dan penyampaian informasi oleh dosen tentang zakat profesi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para mahasiswa maupun

⁸ Henny Suciaty, 2008. *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya di Kota Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 4-7

masyarakat dapat pula mempengaruhi pemahaman dan motivasi masyarakat dalam menjalankan hukum zakat profesi ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi dapat ditemukan dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan yang mendefinisikan bahwa “persepsi adalah tanggapan, daya memahami, penglihatan, sensasi dan interpretasi”.⁹ Sedangkan Slameto memberikan pengertian persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia.¹⁰

Menurut Kartono, persepsi adalah pengamatan secara global belum disertai kesadaran, sedang subjek dan objek belum terbedakan satu sama lain baru ada proses memiliki tanggapan.¹¹ Sementara itu, Desmita mengutip pendapat Leavitt, menyatakan bahwa *perception* dalam pengertian sempit adalah “penglihatan”, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas, *perception* adalah “pandangan”, yaitu bagaimana seseorang memandangi atau mengartikan sesuatu.¹²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi merupakan bagian Proses persepsi itu menurut DeVito melalui tahap-tahap yang satu sama lainnya bersifat kontinyu, bercampur

⁹ G. Sapetra, 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 302.

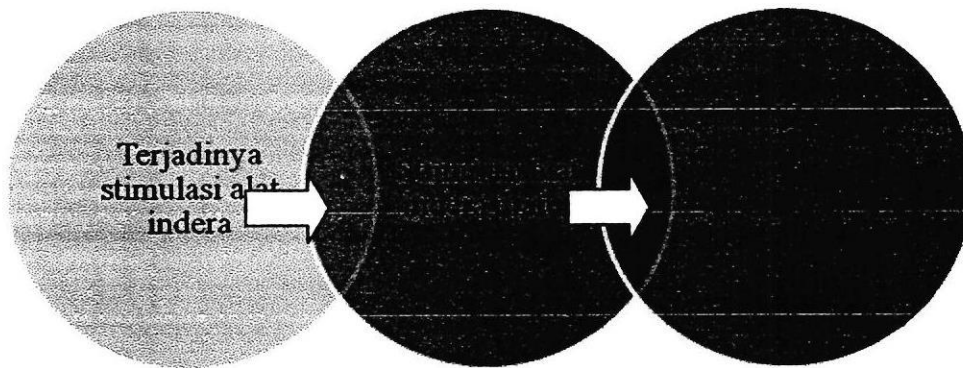
¹⁰ Slameto, 1986. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: CV Ilmu, hlm. 2.

¹¹ Kartini Kartono, 1991. *Psikologi Umum*, Jakarta: CV Mandar Maju, hlm. 61

¹² Desmita, 2011. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 117.

baur dan bahkan bertumpang tindih, sebagaimana digambarkannya berikut ini:¹³

Gambar 1
PROSES PERSEPSI



Munculnya persepsi sebagai hasil proses dari penerimaan dan pencernaan stimulasi-stimulasi tidak serta merta terjadi tanpa ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. David Krech dan Richard S. Crutchfield menyebutkan faktor personal dan faktor situasional.¹⁴ Dengan makna yang hampir senada, Miftah Toha menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yakni : faktor internal dan faktor eksternal, dengan penjelasan berikut:¹⁵

1. Faktor Internal yang berasal dari diri individu, berupa: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

¹³ Joseph. A. DeVito, 2011. *Komunikasi Antar Manusia*, Alih Bahasa: Agus Maulana, Tangerang: Karisma Publishing, hlm. 80-81

¹⁴ Jalaluddin Rahmat, 2001. *Psikologi Komunikasi(Edisi REvisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 51-52.

¹⁵ <http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf> diakses tanggal 10 Juli 2013

2. Faktor Eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

C. Pengertian Dosen

Dosen berasal dari Bahasa Belanda yakni *docent* yang berarti guru, yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia.¹⁶ Pengertian dosen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tenaga pengajar di perguruan tinggi”.¹⁷ Dan didefinisikan pula sebagai “pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.¹⁸

Dengan demikian dosen merupakan salah satu pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai profesi.

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik* sesuatu

¹⁶

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kata_serapan_dari_bahasa_Belanda_dalam_bahasa_Indonesia diakses tanggal 28 Juli 2013

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 275

¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Dosen> diakses tanggal 28 Juli 2013

itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹⁹

Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah* dan *terpuji*: semuanya digunakan di dalam al-Quran dan Hadis.²⁰ Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain sebagaimana dikutip oleh Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini artinya *bersih*.²¹ Apabila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu *lebih banyak* mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki *lebih banyak* sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi *diperbanyak*.²²

Zakat wajib ini menurut bahasa al-Quran juga disebut sedekah sehingga Mawardi mengatakan, "Sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetap arti sama."²³

Qadhi Abu Bakar bin Arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan *shadaqah*: "Kata *shadaqah*

¹⁹ Yusuf Qardhawi, 1999. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk. Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 34

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hlm. 36

berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.”²⁴

2. Pengertian Zakat Profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris “*profession*” yang berarti pekerjaan.²⁵ Kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.²⁶

Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi disini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang dikaitkan dengan profesinya. Profesi itu baik dilakukan sendirian, maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang sudah sampai ukurannya senisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dll. Menurut Muhammad, Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.²⁷

Qardhawi mengatakan bahwa barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang

²⁴ *Ibid.* hlm 38

²⁵ John M. Echols, dan Hassan Shadily, 1995. *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 449.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 789.

²⁷ Muhammad, 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 58.

diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.²⁸ Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam :

Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.²⁹

Menurut Hafidhuddin, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³⁰

3. Landasan Normatif Zakat Profesi

Dasar Hukum diwajibkannya zakat profesi dalam Syari'at Islam adalah Firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Op.Ci.*, hlm. 459

²⁹ *Ibid*

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 95.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.³¹

Kata “ما” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi “ما كسبتم” artinya “sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum.³²

Shihab memberikan penafsiran terhadap ayat di atas mengatakan:

Yang dinafkahkan hendaknya *yang baik-baik*. Tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup *sebagian* saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah *dari hasil usaha kamu* dan *dari apa yang Kami (Allah) keluarkan dari bumi*.³³

Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha yang baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga *yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian

³¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 67

³² Masfuk Zuhdi, 1991. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, hlm. 215.

³³ Quraish Shihab, 2000. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 538

seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain, semua dicakup oleh makna kalimat *yang Kami keluarkan dari bumi*.³⁴

Berdasarkan pemahaman ayat tersebut, zakat profesi secara tersirat hukumnya wajib. Sebabnya, dengan memiliki suatu profesi atau pekerjaan tertentu, seorang muslim dapat memiliki harta. Selain itu, bila pekerjaan muslim tersebut halal, maka hal itu dapat menjadi landasan terjadinya wajib zakat. Jadi, dari sisi dalil naqli (ayat), zakat profesi memang diwajibkan dan tersirat jelas dalam Al-Quran.³⁵

Ali Mustafa Yaqub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal tersebut berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat. "Zakat profesi ini sebetulnya zakat penghasilan. Cuma namanya saja yang zakat profesi biar lebih familiar hukumnya wajib".³⁶

4. Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat.³⁷ Tentang syarat-syarat yang melekat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 538-539.

³⁵ Noor Aflah, 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia, dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 107

³⁶ *Ibid.*, hlm. 108

³⁷ Amir Syarifuddin, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm.40.

dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat. Syarat dari orang yang berzakat atau *muzakki* ialah ia orang Islam yang telah balig dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat.³⁸

Syarat harta yang dizakatkan adalah : harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nisab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *haul*.³⁹ Ini adalah syarat umum yang berlaku untuk semua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di samping itu terdapat juga syarat khusus yang berlaku untuk harta zakat tertentu.⁴⁰

5. Nisab dan Haul

Yang dimaksud dengan *nishab* ialah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.⁴¹ Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas harta yang kepemilikannya belum mencapai satu tahun (*haul*).⁴²

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wahbah Zuhayly, 2005. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 95.

⁴² *Ibid*, hlm. 97.

untuk menetapkan arti "lebih" (*'afw*) yang disebutkan dalam al-Quran sebagai sasaran zakat tersebut.⁴³ "Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab."⁴⁴

Dalam penentuan nishab zakat profesi, antara satu ulama dengan yang lainnya berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan pengambilan qiyas terhadap beberapa jenis objek zakat yang berkembang pada masa Rasulullah SAW masih hidup seperti zakat pertanian, emas dan perak, perdagangan, dan rikaz (barang temuan). Secara garis besar, qiyas penentuan nishab zakat profesi ini dapat diklasifikasikan dalam 6 pendapat, yaitu:

a. Qiyas dengan zakat pertanian

Syaikh Muhammad al Gazali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian,⁴⁵ begitu pula Mustafa Ahzami Samiun menyebutkan, zakat profesi lebih cocok diqiyaskan dengan zakat pertanian dibandingkan zakat perdagangan. Pertanian dan profesi menghasilkan pendapatan pada musim-musim tertentu, sedangkan perdagangan menghasilkan pendapatan bergantung pada performa bisnis. Metode qiyas *syabah* atau menyerupai ini dilakukan karena panen pertanian terjadi pada musim-musim tertentu, dan profesi juga menghasilkan gaji pada musim tertentu seperti bulanan tanpa

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm. 482

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 460

⁴⁵ Muhammad, 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 62

mensyaratkan adanya haul (satu tahun).⁴⁶ Berdasarkan qiyas tersebut, nisab zakat profesi adalah sebanyak lima *wasaq* atau setara 653 kg (ada pula yang menyebut 750 kg). Dalam hal ini, terdapat perbedaan ulama yang menetapkan ukuran lima *wasaq* dengan menggunakan gabah kering hasil pertanian, dan sebagian besar ulama menggunakan beras hasil pertanian sebagai ukuran lima *wasaq*.⁴⁷

Apabila dihitung berdasarkan harga beras saat ini yang kebanyakan dikonsumsi masyarakat seharga Rp. 10.000 x 653 kg maka nishabnya sebesar Rp. 6.530.000,-. Jumlah yang wajib dizakatkan setelah mencapai nishabnya adalah 5% jika penghasilan profesinya diperoleh dengan cara susah (kerja keras) dan 10% jika diperoleh dengan mudah.⁴⁸

b. Qiyas dengan zakat emas dan perak

Ulama yang tidak sepakat dengan qiyas zakat pertanian memandang zakat profesi lebih mendekati pola zakat emas dan perak. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhayly, dan kebanyakan ulama.⁴⁹ Jika dianalogikan dengan emas, maka nishabnya 94 gram.⁵⁰

⁴⁶ Noor Aflah, *Op.Cit.*, hlm. 114

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Penentuan kriteria dan klasifikasi pekerjaan yang sifatnya susah (kerja keras) dan yang mudah tersebut masih bersifat relatif dan *debatable*.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 65

⁵⁰ *Ibid.*

Hal yang sama diungkapkan Yayat Hidayat bahwa zakat rofesi dapat dianalogikan dengan zakat emas karena emas adalah standar nilai mata uang dan itulah yang dihasilkan dari profesi. Analogi ini juga digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Mu'tamar Wiradea tahun 1972 yang menyepakati nishab zakat profesi sebesar 85 gram emas murni. Pendapat ini dilandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Ali r.a. dengan matan yang dipandang *rajih* (kuat) dan *shahih* (terjamin kebenarannya).⁵¹

Apabila zakat profesi dianalogikan dengan emas atau perak maka berlaku haul sebagaimana difahami oleh mayoritas ulama (kecuali Yusuf Qardhawi), dimana nishab dihitung setelah penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, apabila memenuhi syarat nishab maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Apabila ditaksir dengan harga emas saat ini untuk emas murni harganya sekitar $\text{Rp.}500.000/\text{gr} \times 85 = \text{Rp.}42.500.000/\text{tahun}$, (rata-rata sebesar $\text{Rp.}3.541.700/\text{bulan}$), dan wajib dizakatkan sebesar 2,5% yakni $\text{Rp.}1.062.500$.

c. Qiyas dengan Rikaz

Ada pula yang menganalogikan zakat profesi dengan rikaz (barang temuan) yang tidak mensyaratkan adanya nishab, sehingga manakala penghasilan berupa gaji, upah, atau honor diperoleh maka langsung dikeluarkan sebesar 20%. Pendapat ini dianggap Muhammad

⁵¹ Yayat Hidayat, *Op.Cit.*, hlm. 172-173

sangat musykil mengingat pada umumnya gaji para pekerja tersebut masih tergolong kecil, dan mesti diperoleh melalui kerja keras, tidak sama halnya dengan rikaz yang bisa disebut sebagai rezeki *nomplok* tanpa ada usaha sebelumnya.⁵²

d. Qiyas dengan zakat perdagangan

Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa zakat profesi lebih cenderung mirip dengan zakat perdagangan dibandingkan zakat pertanian. Pedagang juga termasuk profesi berupa penjual barang atau jasa, sedangkan petani lebih cenderung sebagai produsen barang dagangan dan bukan penjual.⁵³ Berdasarkan qiyas tersebut, Yaqub menyamakan nisab atau ukuran wajib zakat profesi dengan nisab zakat perdagangan dengan menggunakan dasar emas dengan jumlah 94 gram atau 85 gram emas murni tergantung harga emas pada saat penghitungan zakatnya dengan prosentase sebesar 2,5 persen.⁵⁴ Persolannya para ulama masih berdebat tentang ada atau tidaknya nishab dan haul zakat perdagangan karena selama ini hanya diqiyaskan pada zakat emas dan perak, dimana Rasulullah SAW tidak memberi ketegasan untuk jumlah nishab dan haul zakat perdagangan.⁵⁵

⁵² Muhammad, *Op. Cit.*, hlm., 65

⁵³ *Ibid.*, hlm. 116

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 66

e. Qiyas dengan zakat uang

Zakat uang tergolong hasil ijtihad yang telah disepakati oleh semua ulama mulai sahabat, tabi'in dan para fuqaha, diantaranya Abdullah ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan pemikir modern Islam yakni Yusuf Qardhawi, atas kebiasaan pemberian gaji oleh Khalifah kepada para tentaranya.

Qardhawi berpendapat bahwa zakat profesi lebih dekat dengan zakat uang yang mana gaji atau upah yang diterima pekerja berupa uang pula, dan nishab zakat uang dianalogikan dengan emas dan perak. Menurutnya analogi kepada hasil pertanian lebih tepatnya digunakan atas pendapatan dari investasi berupa gedung-gedung, pabrik-pabrik atau sejenisnya yang modalnya masih utuh.⁵⁶ Untuk itu nishab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas murni.

Terhadap berbagai perbedaan pendapat di atas, Qardhawi menawarkan kompromi hukum dengan memberikan alternatif sebagai berikut:⁵⁷

- a Memberlakukan nishab 94 gram (emas jadi) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima (tanpa menunggu haul), khususnya bagi pegawai yang mendapatkan gaji yang tinggi;
- b Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu hingga mencapai nishab (94 gram emas jadi) dan cukup haul (meskipun beliau menilai haul tidak wajib karena landasan

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm 482.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 483.

hukumnya tidak kuat dan kabur). Jika tidak mencukupi nishab hingga melebihi batas haul, maka tidak wajib zakat.

f. **Qiyas dengan *Ghanimah***

Pendapat ini dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat yang berasumsi bahwa masalah nishab zakat profesi bukan tanpa dalil yang tegas. Menurutnnya dalam al-Qur'an terdapat dua kelompok nash, yaitu nash-nash tentang zakat dan nash-nash di luar zakat yang bisa dihubungkan dengan metode qiyas. Rujukannya yakni makna *ghanimah* dan *khumus* dalam Surah al-Anfal [8]: 41 berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁵⁸

Jalaluddin memaknai *ghanimah* adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari pengerahan segenap kemampuan baik tenaga dan pikiran, jiwa dan raganya. Atas *ghanimah* tersebut, seperlimanya atau 20% menjadi hak Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan). Menurutnnya

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 267

ghanimah lebih tepat dimaknai dengan pahala atau keuntungan seperti yang terungkap dalam Surah an-Nisa ayat 94⁵⁹, ataupun sebagaimana termuat dalam Kamus al Munawwir yang mengartikan ghanimah yaitu kelebihan harta yang diperoleh baik dari peperangan maupun bukan peperangan.⁶⁰

Pendapat ini menekankan pada para pekerja profesi yang mempunyai penghasilan besar yang secara rutin ataupun sewaktu-waktu diterimanya tanpa penentuan nishabnya, sedangkan bagi para profesional yang penghasilannya hanya cukup untuk membayar kebutuhan pokok sekeluarga tidak diwajibkan *khumus*.

Kementerian Agama RI melalui regulasi-regulasinya yang dipublikasikan dalam bentuk buku-buku panduan zakat⁶¹ senada dengan pendapat Hafidhuddin yang menganjurkan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan

⁵⁹ Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 70

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm 1020

⁶¹ Kementerian Agama RI menerbitkan Buku Saku Menghitung Zakat, salah satu isinya tentang cara menghitung zakat profesi. Baca: Kemenag RI, 2012. *Buku Saku Menghitung Zakat*, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, hlm. 61-68.

zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen.⁶²

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *'urf* (tradisi) di sebuah Negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para dai yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.⁶³

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.⁶⁴ Adpaun dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub 'ul usyri* atau 2,5 persen.⁶⁵

⁶²*Ibid*

⁶³*Ibid*

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

C. Kerangka Pikir

Zakat profesi merupakan hal baru dalam khazanah ilmu fiqh. Dua sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan Hadis tidak mengaturnya dengan tegas, sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat profesi. Hingga saat ini ada asumsi bahwa perintah zakat harus dijalankan sesuai dengan teks hadis yang berhubungan dengan harta-harta yang wajib dizakati. Tentu saja asumsi ini perlu dikritisi, sebab kenyataannya pada saat ini telah banyak kelompok orang-orang yang mempunyai penghasilan besar lewat profesi tertentu yang tidak termasuk dalam kategori wajib zakat (*muzakki*) sebagaimana yang tercantum dalam fiqh klasik. Padahal penghasilan mereka sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya, dosen, dokter, pengacara, anggota legislatif, dan beragam jenis profesi lainnya.

Dalam fiqh klasik, profesi seperti itu sama sekali tidak disentuh sebagai kelompok yang diwajibkan membayar zakat. Mereka bukanlah peternak hewan, pedagang, penambang, dan bukan pula petani, sehingga tidak masuk dalam kategori *muzakki* yang dibahas dalam fiqh klasik. Padahal tidak tertutup kemungkinan, penghasilan mereka jauh lebih besar dibanding penghasilan sebagai petani, peternak dan penambang, yang jika penghasilannya telah mencapai nisab, mereka diwajibkan mengeluarkan zakat.

Oleh karena itu, sangatlah ironis dan terkesan menjauhi prinsip keadilan dan tidak keberpihakan Islam kepada kaum miskin, jika kelompok

yang berpenghasilan tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat dengan alasan telah dibahas secara tuntas dalam fiqh klasik, sementara itu ada kelompok lain dengan profesi baru yang mempunyai penghasilan jauh lebih besar, tidak dituntut kewajiban untuk mengeluarkan zakat hanya karena alasan bahwa zakat profesi tidak ditemukan dan belum dibahas dalam pembahasan fiqh klasik.

Salah satu profesi yang memiliki penghasilan yang lumayan tinggi dan dapat dikategorikan masuk sebagai muzakki adalah dosen. Profesi dosen tergolong pekerjaan dengan penghasilan tetap diterima setiap bulannya dan sebagai tenaga pengajar, status dosen menjadi simbol, panutan, dan referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat di sekitarnya. Untuk itu persepsi para dosen dalam hal zakat profesi sangat penting untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan pengamalan dosen tersebut terhadap zakat profesi yang saat ini secara legitimatif telah dicantumkan sebagai objek zakat mal dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2) huruf h dengan sebutan “pendapatan dan jasa”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*) yang menganalisis Persepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang Zakat Profesi.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat subjek dan objek tertentu. Penelitian ini mendeskripsikan Persepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang Zakat Profesi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian telah dilakukan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Keduanya merupakan Perguruan Tinggi Islam yang ada di Kota Palangka Raya dan mengingat Kota Palangka Raya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah yang tentunya memiliki akses yang lebih cepat terhadap berbagai informasi, ilmu pengetahuan, maupun sosialisasi khususnya tentang zakat profesi. Disamping itu, kedua perguruan tinggi ini merupakan tempat pengkajian dan pengembangan hukum Islam di Kota Palangka Raya dimana

persepsi dan aksi para pengajar (dosen) setidaknya dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan tentang hukum Islam bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya terkait zakat profesi.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah persepsi dosen perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang zakat profesi, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah para dosen di perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya yaitu: Sekolah Tinggi Islam Negeri Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP). Selanjutnya untuk menfokuskan penelitian, penulis membatasi dengan menentukan kriteria subjek penelitian (*purposive sampling*) sebagai berikut:

- a. Berstatus dosen tetap;
- b. Khusus dosen pada STAIN Palangka Raya minimal memiliki Pangkat Lektor Kepala;
- c. Khusus Universitas Muhammadiyah Palangka Raya hanya difokuskan pada dosen Fakultas Agama Islam.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti menentukan jumlah dosen yang dapat dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Dosen STAIN Palangka Raya berjumlah 20 orang;
- b. Dosen Fakultas Agama Islam UM Palangka Raya berjumlah 3 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi dilakukan untuk mengamati aktifitas subjek penelitian secara tidak langsung untuk mengetahui relevansinya dengan persepsi yang disampaikan melalui wawancara;
- b. Wawancara; peneliti melaksanakan wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu, dan untuk data/informasi yang belum jelas maka dilakukan wawancara secara mendalam kepada responden tertentu yang dipilih;
- c. Dokumentasi; teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang profil lokasi penelitian, profil subjek penelitian, maupun dokumen-dokumen lainnya, sehingga diharapkan dapat menggambarkan secara umum keadaan daerah dan subjek yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam pengolahan dan analisis data ada beberapa tahapan yang diperlukan sebagaimana diungkapkan oleh Bungin, yakni peneliti mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Data Collection*. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh tanpa proses pemilahan.
2. *Reduksi Data*, yaitu dengan memilih dan memilah hal-hal yang pokok (inti) sesuai dengan fokus penelitian atau memilih dan memilah dari sekian banyak data yang telah terkumpul dengan membedakan antara yang relevan dan yang kurang relevan, sehingga dapat menggambarkan secara tajam hasil temuan, sesuai dengan permasalahan.

3. *Display Data*, yaitu hasil dari reduksi data perlu disajikan dalam bentuk laporan secara sistematis yang mudah dibaca/dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, dengan menggunakan uraian (*narrative*) dan pada akhirnya dibuat kesimpulan.⁶⁶

Adapun analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif maksudnya penelitian difokuskan kepada masalah-masalah yang lebih mendalam dan lebih rinci, fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus penelitian yang telah menjadi sasaran.

⁶⁶ Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 69 – 70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil STAIN Palangka Raya

a. Sejarah berdirinya STAIN Palangka Raya

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya didirikan pada tahun 1997. Pada awalnya lembaga ini bernama Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya, diresmikan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, H. Mastur Jahri, MA pada tahun 1972. Lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru Agama Islam di Kalimantan Tengah. Selanjutnya Fakultas ini memperoleh status terdaftar berdasarkan surat keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor: Kep/D.V218/1975 tanggal 13 Nopember 1975.

Pada periode 1975-1980, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya belum mengalami kemajuan yang berarti. Ketika itu mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi hanya 6 orang pada jenjang sarjana muda. Kemudian pada tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya bergabung dalam Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (BKS-PTAIS) se Indonesia. Berdasarkan surat BKS-PTAIS dengan Nomor: 008/104/0/BKS-PTAIS/1985 tertanggal 19 Januari 1985 Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya secara resmi diterima menjadi anggota Kopertis IV Surabaya.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 9 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Agama tahun 1988, sejak 9 Juli 1988 Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri yang merupakan Fakultas Tarbiyah bagian dari IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan perubahan status tersebut memberikan peluang kepada STAIN Palangka Raya untuk menerapkan manajemen sendiri, mengembangkan kelembagaan, jurusan dan program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Kepemimpinan di STAIN Palangka Raya sejak berdirinya telah mengalami pergantian sebagaimana tabel berikut:⁴⁸

Tabel 1
**PIMPINAN STAIN PALANGKA RAYA
BERDASARKAN PERIODE**

No.	Periode	Nama Pimpinan	Nama Jabatan
1	1972-1977	H.M. Imran Yusuf	Pjs. Dekan
2	1977-1984	Drs. Soeparman	Pjs. Dekan
3	1984-1988	Drs. M. Husein	Dekan
4	1988-1997	Drs. H. Syamsir S.MS	Dekan
5	Juni-Nop 1997	Drs. H. Syamsir S.MS	Dekan
6	Nop 1977-Juli 2000	Drs. M. Mardjudi, SH	Pjs. Ketua

⁴⁸ Tim Penyusun, 2012., *Profil STAIN Palangka Raya Tahun 2011*, hlm. 2

7	2000-2004	Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd	Ketua
8	2004-2008	Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd	Ketua
9	2008-2012	Drs.H. Khairil Anwar, M.Ag	Ketua
10	2012-sekarang	Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH., MH.	Ketua

b. Visi dan Misi STAIN Palangka Raya

STAIN Palangka Raya dibawah kepemimpinan Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH. MH saat ini telah menetapkan Visi dan Misi STAIN Palangka Raya sebagai berikut:⁴⁹

Visi

1. Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam yang kompetitif dalam melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Terwujudnya Sekolah Tinggi Agama Islam sebagai pusat pemantapan aqidah, akhlakul karimah, pengembangan ilmu dan profesi sebagai pengembangan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat Muslim.

c. Stuktur Kelembagaan

Struktur dan komposisi kelembagaan STAIN Palangka Raya baru saja melakukan perombakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

⁴⁹

http://stainpalangkaraya.ac.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=77 diakses tanggal 7 Desember 2013

STAIN Palangka Raya yang mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2013, sebagai berikut:⁵⁰

Tabel 2
**ORGANISASI PENGELOLA
STAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2013**

NO	Organ Pengelola	Sub Organ Pengelola
1	Ketua	-
2	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga 2. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUAK) 3. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3	Jurusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarbiyah (Prodi PAI, TBI, TBG, TFS, dan TBA) 2. Syari'ah dan Ekonomi Islam (Prodi AHS, ESY, dan HESY) 3. Dakwah dan Komunikasi (Prodi KPI)
4	Pasca Sarjana	Magister Manajemen Pendidikan Islam
5	Bagian AUAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbag Administrasi Umum 2. Subbag Perencanaan, Keuangan, dan Akuntansi 3. Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni 4. Kelompok Jabatan Fungsional (Dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran)
6	Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2. Pusat Penjaminan Mutu
7	Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Perpustakaan 2. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 3. Unit Pengembangan Bahasa

⁵⁰ Dokumentasi Subbag Administrasi Umum tahun 2013

d. Jumlah Pegawai

Dalam menyelenggarakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi, STAIN Palangka Raya memiliki Sumber Daya Manusia dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari pegawai struktural dan pegawai fungsional dengan rincian sebagai berikut.⁵¹

Tabel 3
**JUMLAH PNS STAIN PALANGKA RAYA
TAHUN 2013**

NO	Status/Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Pegawai Fungsional	
	a. Dosen	88 orang
	b. Pustakawan	4 orang
	c. Perencana	1 orang
2	Pegawai Struktural	44 orang
Jumlah		136 orang

Selanjutnya data dosen tetap STAIN Palangka Raya berdasarkan pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada tabel berikut.⁵²

Tabel 4
**JUMLAH DOSEN TETAP STAIN PALANGKA RAYA
BERDASARKAN PANGKAT & GOLONGAN/RUANG**

NO	Pangkat	Gol/Rg	Jumlah
1	Lektor Kepala	IV/c	4 orang
2	Lektor Kepala	IV/b	6 orang
3	Lektor Kepala	IV/a	15 orang
4	Lektor	III/d	23 orang

⁵¹ Ibid. Data Kepegawaian Update bulan Nopember 2013

⁵² Sesuai Daftar Gaji Pegawai Bulan Desember 2013 tertanggal 8 Nopember 2013 dan Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen STAIN Palangka Raya untuk bulan Nopember 2013 tertanggal 2 Desember 2013.

5	Lektor	III/c	33 orang
6	Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli	III/b	6 orang
7	Penata Muda/Calon Dosen	III/a	1 orang
Jumlah			88 orang

2. Profil Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

a. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya atau yang disingkat UM Palangka Raya berdiri atas hasil Muklumat Muhammadiyah ke-41 di Surakarta, yang ditindaklanjuti oleh Pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah dengan membentuk panitia pendirian UM Palangka Raya melalui Surat Keputusan No. A-2/18/SK-PWM/1986 tanggal 28 Agustus 1986.⁵³

Semenjak didirikannya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya terus berkembang. Sekarang tampuk pimpinan sebagai Rektor dipegang oleh Drs. H. Bulkani, M.Pd. untuk masa jabatan 2011-2014.

b. Visi dan Misi

UM Palangka Raya dalam menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai visi dan misi sebagai berikut:⁵⁴

Visi

Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan taqwa

⁵³ Buku Selayang Pandang Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2013, hlm. 1-2

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 1

Misi

Berkaitan dengan misi “rahmatan lil ‘alamiin”, serta kedudukan sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, dirumuskan misi UM Palangka Raya sebagai berikut:

1. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan nilai-nilai keislaman dan tuntutan zaman dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama;
2. Mengembangkan sumber daya manusia berlandaskan nilai-nilai keislaman, dan memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama;
3. Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama.

c. Jumlah Fakultas dan Program Studi

Mengawali berdirinya UM Palangka Raya terdiri dari 2 (dua) Fakultas dan 3 (tiga) Program Studi yaitu: Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Prodi Agroteknologi (1987), dan Fakultas Agama Islam dengan Prodi Ahwal al-Syakhshiyah (1987) dan Prodi Pendidikan Agama Islam (1987). Selanjutnya pada tahun 1990 dibuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan Program Studi Administrasi Negara dan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan dengan dua Program Studi yakni Bimbingan Konseling dan Pendidikan Ekonomi. Pada tahun 1998 ditambah dengan Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, dan pada tahun 2000 ditambahkan Program Studi Kehutanan pada Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Terakhir pada tahun 2006 ditambah lagi Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari Prodi Farmasi dan Prodi Analisis Kesehatan, dan pada tahun 2007 Fakultas

Pendidikan dan Ilmu Keguruan dilengkapi dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.⁵⁵

Dengan demikian total keseluruhan fakultas dan program studi hingga tahun 2013 pada UM Palangka Raya sebanyak 6 (enam) fakultas dan 11 program studi.

d. Jumlah Dosen

Secara keseluruhan, jumlah dosen UM Palangka Raya berdasarkan status kepegawaiannya sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 5
JUMLAH DOSEN UMP TAHUN 2013

Dosen Tetap Yayasan	Dosen Tetap Dipekerjakan	Dosen Luar Biasa	Jumlah
44	12	0	56

Adapun jumlah dosen tetap pada Fakultas Agama Islam UM Palangka Raya berdasarkan data tersebut berjumlah 4 (empat orang) yang terdiri dari 3 (orang) menjabat sebagai Tenaga Pengajar dan 1 (satu) orang menjabat sebagai Asisten Ahli.⁵⁷ Namun data terakhir menurut pengelola Fakultas Agama Islam UM Palangka Raya bahwa dosen tetap dimaksud berkurang menjadi 3 orang karena salah satunya sedang menduduki jabatan pada lembaga lain (Komisi Pemilihan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 3

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 9

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 11

Umum Kota Palangka Raya) yang mensyaratkan harus melepas statusnya sebagai dosen untuk sementara di UM Palangka Raya.⁵⁸

B. Persepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam Di Kota Palangka Raya tentang Status Hukum Zakat Profesi

Diskursus tentang zakat profesi ini nampaknya telah merambah ke dalam dua lembaga pendidikan tinggi Islam di Kota Palangka Raya yakni Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. Dalam kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi Islam kedua lembaga ini bertugas menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dengan melibatkan dosen sebagai aktor utama. Dosen atau disebut pula dengan tenaga pengajar di perguruan tinggi merupakan salah satu pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai profesi. Jerih payah, usaha, dan jasanya sebagai tenaga pengajar diapresiasi dalam bentuk imbalan gaji dan/atau honorarium/insentif yang diperoleh dosen setiap bulannya.

Secara individual terkait profesinya yang termasuk objek zakat, dosen tetap pada STAIN Palangka Raya dan dosen tetap yayasan pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Fakultas Agama Islam memiliki pemahaman dan kesimpulan yang beragam menyangkut zakat profesi terutama mengenai status hukumnya.

⁵⁸ *Ibid.* dan data Fakultas Agama Islam UM Palangka Raya bulan Oktober 2013.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui wawancara kepada 20 orang dosen tetap di STAIN Palangka Raya dan 3 orang dosen tetap yayasan di Prodi Pendidikan Agama Islam UM Palangka Raya, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok persepsi terhadap status hukum zakat profesi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6
PERSEPSI DOSEN TENTANG STATUS HUKUM ZAKAT PROFESI

Pembagian Kelompok	Identitas Dosen	Pendapat
Kelompok I (17 orang)	SS, FR, HMD, MZR, JHD, SMT, SDM, KA, NM, AQ, SU, FL, SNW, LK, RR, RJ, dan ABB	Zakat profesi hukumnya wajib bagi yang mampu
Kelompok II (4 orang)	AJH, SYK, dan AR	Hukum zakat profesi belum jelas karena masih <i>ikhtilaf</i>
Kelompok III (2 orang)	FM, HA, dan RMR	Belum tahu hukumnya karena belum mendalami tentang zakat profesi

Secara enumeratif, persepsi ketiga kelompok ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Zakat Profesi Hukumnya Wajib

Para dosen yang memiliki persepsi yang sama dan mengakui kewajiban terhadap zakat profesi ini adalah berjumlah 17 orang terdiri dari 14 orang dosen STAIN Palangka Raya dan 3 orang dosen UM Palangka Raya. Kewajiban zakat atas penghasilan yang diperoleh dari profesi menurut mereka berlaku manakala orang muslim yang menjadi

sasarannya telah tergolong mampu dan penghasilan yang dimiliki telah mencapai batas nishabnya. Berikut pernyataan mereka masing-masing:

- a. SS mengatakan: "Hukumnya wajib bagi yang mampu yakni tidak memiliki hutang dan terpenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga"⁵⁹
- b. FR mengatakan: "Wajib hukumnya sama seperti zakat mal lainnya apabila punya kelebihan dari sekedar memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan dan keluarganya".⁶⁰
- c. HMD mengatakan: "wajib hukumnya kalau sudah sampai nishab dan akumulasi dari sisa harta bersih (netto/setelah dikeluarkan segala kebutuhannya, *pen*)."⁶¹
- d. SDM mengatakan: "Wajib apabila *kadada* (tidak ada) hutang dan ada kelebihan penghasilan sudah sampai hitungan nisabnya sama dengan emas"⁶²
- e. NM mengatakan: "Hukumnya wajib jika akumulasi penghasilannya minimal setara 96 gram emas"⁶³
- f. JHD mengutarakan: "Wajib bagi yang mampu dalam artian cukup haul dan nishab jumlah uangnya"⁶⁴
- g. FL mengatakan: "wajib hukumnya apabila penghasilan perbulan melebihi nishab zakatnya"⁶⁵

⁵⁹ Wawancara tanggal 6 Nopember 2013 di STAIN Palangka Raya

⁶⁰ Wawancara tanggal 28 Oktober 2013 di STAIN Palangka Raya

⁶¹ Wawancara tanggal 6 Nopember 2013 di rumah HMD

⁶² Wawancara tanggal 5 Nopember 2013 di rumah SDM

⁶³ Wawancara tanggal 30 Oktober 2013 di STAIN Palangka Raya

⁶⁴ Wawancara tanggal 25 Oktober 2013 di STAIN Palangka Raya

- p. SU menyatakan: “ hukumnya wajib apabila sudah mencukupi kebutuhan pokok dan hak-hak dasar, dan ada lainnya”⁷²
- q. KA mengatakan: “ hukumnya wajib bagi yang mempunyai kemampuan, sebagaimana menurut sebagian ulama kontemporer”.

Ditambahkannya:

“Fungsi dan tujuan zakat profesi antara lain adalah membersihkan harta (tuthahhirihum) agar harta yang ada ditangan menjadi halal, membantu fakir miskin dan yang memerlukan, membersihkan jiwa (tuzakkihim) manusia dari sifat pelit dan bakhil, menambah dan mengembangkan (tuzakkihim) harta di dunia agar uang beredar di masyarakat, dan *saving* di akhirat kelak”⁷⁴

Persepsi semacam ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pendalaman bahkan pengalaman mereka dalam menunaikan zakat profesi. Pengetahuan tentang zakat profesi umumnya mereka peroleh dari berbagai sumber referensi seperti buku, televisi, internet, majalah, seminar, dan pengajian-pengajian yang pernah mereka ikuti. Sebagian besarnya menggali sendiri informasi zakat profesi melalui buku-buku.

Hanya saja diantara mereka masih beragam dalam memaknai kata “mampu” yang menjadi syarat wajibnya zakat profesi tersebut. Ada yang berpandangan bahwa termasuk kategori mampu manakala telah terpenuhi segala kebutuhan sehari-hari dan masih memiliki kelebihan dari penggunaan penghasilannya setiap bulan yang mencapai nishab yang telah ditentukan.

⁷² Wawancara tanggal 29 Oktober 2013 di STAIN Palangka Raya

⁷³ Wawancara tanggal 28 Oktober 2013 di STAIN Palangka Raya

⁷⁴ Wawancara tanggal 7 Nopember 2013 via email dan telepon seluler

Standarisasi kebutuhan yang dimaksud pun ternyata difahami secara berbeda di antara mereka. Ada yang menyebut bahwa kebutuhan dimaksud yakni segala yang terkait dengan kebutuhan diri dan keluarga yang bersifat materiil seperti sandang, pangan, dan papan, maupun immaterial seperti rekreasi, refleksi dan kebutuhan batin lainnya. Pendapat ini disampaikan oleh dosen STAIN Palangka Raya yaitu SS, FR, MZ, JHD, SMT, HMD, AQ, dan SDM. Sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut sebagian mereka terpaksa meminjam tambahan dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Adapun KA, NM, SU, DL, SNW, LK, RR, dan RJ menganggap bahwa kebutuhan dimaksud adalah kebutuhan yang pokok dan hak-hak dasarnya secara wajar (secara sederhana/tidak berlebihan, *pen*). Untuk itu, RJ memilah dengan mengatakan: “bagi mereka yang diluaskan rejekinya (gaji bruto) dikali 2,5% atau bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan maka gaji bruto dikurangi kebutuhan pokok lalu dikalikan 2,5%”.⁷⁵ Dengan kata lain menurut RJ para professional yang berpenghasilan pas-pasan maka untuk mengeluarkan zakatnya dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan kebutuhan pokok, lalu dihitung prosentasi zakatnya dari sisanya. Sedangkan bagi para profesional yang diluaskan rezekinya (banyak penghasilan lain diluar gaji yang terkait profesinya), maka zakatnya dihitung langsung dari penghasilan brutonya.

⁷⁵Wawancara dengan RJ, *Op.Cit.*

RJ dan SS menambahkan bahwa mampu adalah berkecukupan dalam berbagai hal baik pangan, sandang, papan dan tidak memiliki hutang. Lebih lanjut ditambahkan oleh ABB bahwa “mampu tidak hanya dari segi finansial tetapi disertai pemahaman konseptual tentang zakat profesi itu sendiri”.⁷⁶

Berdasarkan beberapa persepsi di atas dapat dikemukakan bahwa para dosen tersebut di atas pada dasarnya mengakui bahwa dosen adalah bagian dari profesi yang dimaksudkan beberapa kalangan ulama kontemporer akhir-akhir ini. Profesi dosen baik dalam statusnya sebagai PNS di lembaga pemerintah maupun dosen tetap yayasan yang mana atas keahliannya dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat diapresiasi berupa gaji ataupun honor yang diterima setiap bulan dengan jumlah yang beragam tergantung volume dan masa kerja golongan masing-masing. Rata-rata penghasilan dari profesi perbulan yang mereka terima antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp.10.000.000,-.⁷⁷

Dosen-dosen ini memiliki penghasilan berupa gaji, uang makan, dan tunjangan profesi yang dibayarkan setiap bulannya bahkan terkadang menerima pula honor atau insentif lainnya yang perolehannya tidak menentu kapan waktunya tergantung pekerjaan tambahan di dalam maupun di luar kampus. Pekerjaan tambahan di dalam kampus semisal honor menulis artikel, penelitian, pengabdian masyarakat, atau terlibat

⁷⁶ Wawancara dengan ABB. *Op.Cit.*

⁷⁷ Berdasarkan data dari bendahara pengeluaran STAIN Palangka Raya dan Bendahara UMP berupa Daftar Gaji, Tunjangan Profesi, dan Tunjangan Jabatan tahun 2013

dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kampus melalui kepanitiaan/tim dan sebagainya . Sedangkan pekerjaan di luar kampus yang terkait dengan keahliannya misalnya ceramah pengajian, nara sumber seminar/workshop dan sebagainya yang kerap kali menerima honor dari penyelenggara kegiatan tersebut.

Secara konseptual, zakat pada dasarnya menitikberatkan pada konsep kaya atau mempunyai seorang muslim, dimana harta kekayaan dimaksud telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah digariskan oleh para ulama sebagai berikut:⁷⁸

- a. Harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal sebagaimana digariskan dalam Surah an-Nisa ayat 29 dan Surah al-Baqarah ayat 188 dan 267 (telah disebutkan pada uraian di atas).

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁷⁹

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 20-27

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 122

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁸⁰

Mengenai ayat 267 pada Surah al-Baqarah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa harta yang diperintahkan untuk dinafkahkan sebagiannya itu bukan berarti haruslah yang terbaik, karena yang dilarang dalam ayat tersebut adalah dengan sengaja mengumpulkan yang buruk lalu kemudian menyedekahkannya.⁸¹

- b. Harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan misalnya melalui usaha, perdagangan, pembelian saham, deposito, tabungan baik dilakukan sendiri maupun bersama pihak lain. Menurut Yusuf Qardhowi pengertian berkembang terdiri dari dua: secara konkrit dengan diusahakan, diperdagangkan, dan sejenisnya; dan secara tidak konkrit yakni harta itu berpotensi untuk berkembang baik berada ditangannya sendiri atau di tangan orang lain namun masih atas namanya, misalnya tabungan, deposito, investasi dan sejenisnya;
- c. Harta itu dimiliki secara penuh dan dalam penguasaan pemilik harta tersebut, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain serta pemiliknya dapat menikmatinya;

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 46

⁸¹ Quraish Shihab, 2000. *Tafsir Al-Mishbah... Volume 1, Op. Cit.*, hlm 700.

- d. Harta itu telah mencapai *nishab* yang telah ditentukan, semisal nishab zakat emas 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing sebanyak 40 ekor dan lainnya;
- e. Telah dimiliki atau diusakan oleh muzakki dalam masa waktu satu tahun (haul) khusus untuk sumber-sumber zakat seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak;
- f. Telah terpenuhinya kebutuhan pokok dan masih ada kelebihannya, (pendapat sebagian ulama Hanafi dan Imam al Qurthubi)⁸². Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Pendapat ini berdasar pada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 219 berikut:

... وَدَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ...

Artinya: ...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."...⁸³

Konsep mampu dalam persoalan zakat ini memang difahami beragam pula dikalangan ulama/fuqaha, sehingga hal ini juga mengilhami terjadinya perbedaan pendapat dan pemahaman di kalangan dosen STAIN Palangka Raya maupun UM Palangka Raya karena kebanyakan mereka mendalami zakat profesi ini dari beraneka ragam referensi berupa buku,

⁸² Dikutip Didin Hafidhuddin, *ibid.* hlm 26, dari Ibnu 'Abidin, *Raddal Mukhtar Juz-2*, Mesir: Mustafa al-Baabi al-Halabi, 1996, hal.263 dan Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Syafwatut Tafaasir*, Beirut: Daar el-Ihya Al Turaast Al-'Arabi, 1993, Jilid 1, hlm. 140.

⁸³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 53

televisi, internet, radio, pengajian, dan lainnya seperti seminar dan workshop, dimana semua sumber informasi itu boleh jadi menyajikan informasi yang tidak komprehensif dari seluruh pendapat dan landasan berfikir para ulama/fuqaha dalam menentukan status hukum zakat terhadap berbagai profesi yang berkembang pesat selama ini.

Mereka (para dosen) menyatakan bahwa gaji dan honor yang diterima setiap bulannya adalah sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Namun perbedaan pandangan tentang standar kebutuhan pokok ini kemudian berimplikasi pada cara mereka menentukan apakah masuk kategori mampu atau tidak. Apabila mengacu pada pendapat Imam Hanafi tentang kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, lebih dimaksudkan pada kebutuhan dasar yang sewajarnya dan tidak berlebihan, cukup untuk makan, minum, berpakaian, rumah yang layak huni, kendaraan untuk operasional hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan biaya perawatan-perawatan yang bertujuan agar tidak terjadi kerusakan, sakit, ataupun sengsara.

2. Hukum Zakat Profesi Belum Pasti

Sebagian dosen masih belum dapat memastikan status hukum zakat profesi, diantaranya AJH, SYK, dan AR sebagaimana uraian berikut:

- a. AJH beralasan bahwa “zakat profesi itu hasil ijtihad para ulama yang masih bersifat kontroversi”. Secara pribadi AJH mengakui pernah mempelajari tentang zakat profesi melalui buku, pengajian, dan lain-

lain, bahkan pernah menyampaikan materi zakat profesi pada mata kuliah Fiqih dan mata kuliah Hadis di Tadris Fisika STAIN Palangka Raya. Untuk itu, AJH lebih memilih menggunakan konsep zakat maal secara umum (tanpa mengkhususkan pada zakat profesi) dengan kadar 2,5%.⁸⁴

- b. SYK senada dengan AJH yang mengakui pernah mempelajari zakat profesi melalui buku tetapi SYK belum mau menegaskan pendapatnya tentang hukum zakat profesi. SYK mengatakan: “ zakat profesi bukan suatu kewajiban tetapi pilihan, yang penting mengeluarkan zakat”.⁸⁵ Maksudnya muzakki yang punya profesi dapat memilih mengeluarkan zakat terkait langsung dengan profesinya atau melalui zakat maal yang sifatnya umum seperti zakat emas, zakat investasi, dan lainnya yang sudah ada kepastian hukumnya.
- c. AR pun tidak menegaskan pendapatnya tentang hukum zakat profesi dengan alasan: “saya tidak mendalami bagaimana status hukumnya. Bisa wajib, bisa tidak, sesuai kedudukan dengan tingkat penghasilan dan kemampuannya. Setuju wajib bagi yang benar-benar mampu yang dihitung secara profesional”. AR mengatakan pernah mempelajari zakat profesi melalui TV, buku, ceramah/pertemuan/pengajian yang menyampaikan soal zakat profesi. Secara pribadi, AR mengakui menunaikan zakat *maal* dengan menghitung sendiri nishabnya mengikuti pendapat ulama yang relevan, namun AR tidak menjelaskan

⁸⁴ Wawancara tanggal 29 Oktober 2013 di STAIN Palangka Raya

⁸⁵ Wawancara tanggal 18 Nopember 2013 di rumah SYK

secara rinci jenis zakat *maal* yang dimaksudkan dan ulama mana yang diikutinya.⁸⁶

3. Belum Mengetahui Hukum Zakat Profesi

Pernyataan ini disampaikan oleh HA, FM, dan RMR yang mengakui belum/tidak mempelajari tentang zakat profesi sehingga tidak mengetahui bagaimana hukum zakat profesi tersebut. Menurut HA;

“Memang dengar-dengar masih kontroversial di kalangan ulama fuqaha, saya tidak berani memberikan hukumnya wajib atau tidak karena ini menyangkut berapa penghasilan yang masuk dan berapa pengeluaran, apalagi jika dikurangi dengan hutang-hutang. Menurut pengamatan saya selama ini profesi guru dan dosen antara penghasilan dan pengeluaran termasuk hutang dan lain-lain hampir seimbang”.⁸⁷

FM menyatakan belum memahami betul dasar hukum zakat profesi. FM mengatakan:” saya pernah membaca buku yang berkaitan dengan itu, cuma hanya sekilas” ditambahkan: “mampu itu kan paham dasar hukumnya dan sampai perhitungannya serta dapat melakukannya”. FM mengakui bahwa “zakat fungsinya untuk membersihkan penghasilan kita dan dapat berbagi dengan orang lain sesama kita yang layak menerima”, sehingga FM menyampaikan: “sebetulnya siap saja membayar zakat profesi jika sudah paham perhitungannya apakah dari hasil kotor atau bersih...”.⁸⁸

⁸⁶ Wawancara tanggal 18 Npember 2013 di rumah AR.

⁸⁷ Wawancara tanggal 29 Oktober 2013 di STAIN Palangka Raya

⁸⁸ Wawancara tanggal 6 Nopember 2013 di STAIN Palangka Raya

Hal yang senada dengan argumentasi yang agak berbeda dinyatakan oleh RMR sebagai berikut:

“Saya tidak pernah mempelajari tentang zakat profesi atau tidak mendalaminya. Kebetulan saya masih menjadi orang yang berutang dan membiayai beberapa anak asuh”.

Pernyataan yang dikemukakan HA, FM, dan RMR di atas nampaknya dilatarbelakangi persepsi mereka atas kehidupan pribadi dan terpaku pada profesi yang digelutinya sehingga tidak memunculkan *interesting* atau perhatian untuk memperdalam persoalan zakat profesi secara lebih luas. Disamping itu, menurut HA masih ada bentuk amal sosial lain yang dianjurkan dalam Islam yakni infaq dan sedekah yang tidak terikat nishab dan haul, yang dapat dijadikan sarana untuk mendermakan sebagian dari penghasilan tersebut.

C. Persepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang Nishab Zakat Profesi

Perbedaan analogi di kalangan ulama dalam penentuan nishab zakat profesi turut mempengaruhi persepsi dan pemikiran para dosen di STAIN Palangka Raya maupun di UM Palangka Raya. Untuk menggali persepsi dosen tentang nishab zakat profesi, telah dilakukan wawancara mendalam kepada 17 orang dosen yang telah menyampaikan persepsi tentang status huku zakat profesi di atas. Berdasarkan hasil wawancara, ada 3 (tiga) orang dosen (SU, FR, dan RR) yang tidak memberikan penjelasan tentang nishab zakat profesi

dikarenakan keterbatasan waktu dan pemahaman mereka tentang nishab zakat profesi secara lebih rinci. Selebihnya ada 14 (empat belas) orang dosen yang menyampaikan persepsi mengenai nishab zakat profesi sebagaimana dikelompokkan dalam tabel berikut:

Tabel 7
PERSEPSI DOSEN TENTANG NISHAB ZAKAT PROFESI

Pembagian Kelompok	Identitas Dosen	Pendapat
Kelompok I (4 orang)	SDM, MZR, NM, dan JHD	Nishab emas dengan haul
Kelompok II (5 orang)	KA, ABB, HMD, AQ, dan LK	Qiyas dengan zakat pertanian dan emas
Kelompok III (1 orang)	SS	Qiyas dengan zakat perdagangan
Kelompok IV (4 orang)	RJ, SMT, FL, dan SNW	Qiyas dengan zakat emas tanpa terikat haul

1. Nishab emas dengan haul

Pendapat bahwa nishab zakat profesi sama dengan nishab emas yang berlaku haul didalamnya telah disampaikan oleh SDM, MZR, NM, dan JHD. SDM menyatakan: “ nishabnya *kaya emas*, sekitar 85 gram lah, dikeluarkan kalau ada *lebih* penghasilan selama satu tahun”.

MZR secara tersirat mengatakan: “ wajib dikeluarkan apabila mencukupi hitungan zakat selama satu tahun, dan penghasilannya itu melebihi dari kebutuhan pokok”. Sama halnya JHD mengatakan: “...cukup haul dan nishabnya dan jumlah uang ada dalam satu tahun”. Dapat dipahami bahwa MZR dan JHD menqiyaskan zakat profesi dengan emas yang sebagian besar ulama memberlakukan adanya haul. NM pun lebih

tegas menyatakan: “ zakat profesi wajib bagi yang mampu, akumulasi penghasilan pertahun minimal setara dengan 94 gram emas”,

Mereka berpandangan bahwa penganalogian zakat profesi kepada emas dengan haul lebih memungkinkan mengingat gaji yang diperoleh tergolong cukup dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari bahkan untuk membayar hutang, sehingga sisanya tidak begitu signifikan terhadap nishab. Namun apabila dikumpulkan selama satu tahun apalagi jika ditambah dengan honor atau insentif lainnya yang menunjang profesinya maka boleh jadi akan terpenuhi nishabnya. Alasan penting lainnya yaitu gaji atau honor berupa uang yang menjadi alat bayar utama sebagaimana emas dan perak pada masa Rasulullah SAW.

2. Gabungan Dua Qiyas: Pertanian dan Emas

Pendapat ini dijelaskan oleh KA, ABB, HMD, AQ, dan LK. Secara singkat KA menyampaikan: “saya bayar zakat profesi dengan *ta’jil* perbulan, kadarnya 2,5%”. Ini menunjukkan bahwa KA menganalogikan zakat profesi dengan pertanian (*ta’jil* setelah menerima penghasilan) dan kadar zakatnya seperti emas yakni 2,5%.

ABB menjelaskan: “saya pernah membayar zakat profesi setiap menerima penghasilan profesi dosen sesuai dengan rumus 2,5% dari penghasilan yang diterima”. Sepertinya ABB senada dengan AK, yang mengeluarkan zakatnya 2,5% dari penghasilan yang telah diperolehnya rutin setiap bulan.

Adapun HMD berpendapat: "...penghasilan diakumulasikan dan sampai nishab atau dari penghasilan bersih dikeluarkan 2,5% setiap menerima gaji biasanya tiap bulan". Maksudnya penghasilan yang diperoleh merupakan kelebihan yang mencapai batas nishab (zakat pertanian, *pen*) lalu dikeluarkan setiap menerima penghasilan rutin perbulan sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan tersebut.

AQ berucap: "saya biasanya keluarkan (zakat profesi) setiap bulannya 2,5% dari kelebihan penghasilan yang diterima setelah terpenuhi kebutuhan dasar keluarga". Dan KL pun senada menyatakan: "tiap bulan dibayar, misalnya Rp.6 juta maka dikeluarkan Rp.150.000,- (2,5%)".

Dengan demikian KA, ABB, HMD, AQ, dan KL berpendapat bahwa nishab zakat profesi seperti zakat pertanian sebesar 653 kg dengan kadar kewajiban zakatnya sebesar 2,5% seperti kadar zakat emas atau perak. Penunaian zakatnya dilakukan setiap bulan setelah menerima gaji atau honor yang telah bersih dari kebutuhan pokok sebagaimana halnya dengan zakat pertanian.

Pendapat semacam ini nampaknya mengikuti landasan berfikir Didin Hafidhuddin yang menggunakan *qiyas syabah* yakni qiyas yang illat hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah* (kemiripan) dengan dua hal sekaligus. *Pertama*, dianalogikan dengan zakat pertanian dari segi nishabnya sebesar 653 kg beras (hasil konversi DR. Wahbah Azzuhaili) karena model perolehan penghasilan tersebut mirip dengan panen hasil pertanian yang setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil

sebelumnya. *Kedua*, kadar zakatnya dianalogikan dengan emas atau zakat uang karena gaji, honorarium, atau upah pada umumnya diterima dalam bentuk uang, sehingga kadar zakatnya sebesar *rub 'ul usyri* atau 2,5%.

3. Qiyas dengan Zakat Perdagangan

Pendapat ini disampaikan oleh SS yakni: “Kita kan bukan petani?, memang *kayanya* lebih tepat diqiyaskan dengan nishab zakat perdagangan daripada zakat pertanian karena dosen *kan* menerima gaji sebagai penghasilan atas usaha jasanya baik sebagai abdi negara atau lebih khusus sebagai dosen sebagaimana penghasilan yang diperoleh dari usaha perdagangan yang juga dibebankan zakat kalau sudah mencapai nishab yakni sebesar 85 gram emas dengan kadar 2,5 % itu!”⁸⁹ SS menambahkan bahwa pembayarannya dilakukan setiap bulan setelah menerima gaji atau honorarium, dan dalam hal ini SS tidak menyampaikan secara jelas dasar analoginya, namun menurutnya yang terpenting adalah berbagi kepada sesama sesegera mungkin setelah mendapatkan penghasilan profesi setiap bulannya.

4. Nishab Emas Tanpa Terikat Haul

Pendapat ini diutarakan oleh RJ, SMT, FL, dan SNW yang senada dengan pemikiran Yusuf Qardhawi di atas yang tidak meyakini kewajiban adanya haul dalam zakat emas dan perak, sehingga lebih cenderung berorientasi pada jumlah nishab saja. RJ menjelaskan bahwa “zakat profesi bisa dibayarkan per bulan atau per triwulan atau per tahun tergantung

⁸⁹ Wawancara mendalam pada tanggal 5 Desember 2013 di STAIN Palangka Raya

nishabnya terpenuhi (85 gram emas murni)", (atau setara Rp.42.500.000. jika harga emas Rp.500.000/gram, *pen*). Pendapat yang senada disampaikan oleh FL dengan kalimat: "...apabila penghasilan perbulan melebihi nishab zakat yaitu 85 gram emas, zakatnya 2,5% dari penghasilan bulanan". FL lebih menekankan pada pencapaian nishabnya yang menurutnya lebih baik dikeluarkan setiap bulan apabila telah terpenuhi syarat tersebut.

Demikian pula SNW dan SMT berpendapat bahwa gaji yang biasanya diterima dosen tidak begitu besar sehingga tidak memungkinkan mencapai nishab dalam satu bulan, maka "dapat dikumpulkan dulu hingga sampai nishabnya, atau apabila ingin mengeluarkan setiap bulan boleh saja dengan kadar 2,5% lebih meskipun statusnya hukumnya hanya menjadi sedekah sunat", ujar SNW.

Demikian aneka ragam persepsi yang telah disampaikan oleh para dosen di STAIN Palangka Raya dan UM Palangka Raya mengenai status hukum dan nishab zakat profesi. Dapat dipahami terjadinya perbedaan persepsi karena secara teori dikatakan bahwa persepsi merupakan keadaan *integrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Keberagaman persepsi yang telah disampaikan para dosen di atas terhadap status hukum dan nishab zakat profesi nampaknya memiliki relevansi yang erat dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Sebagian dosen yang lebih detail memberikan persepsinya tentang hukum dan nishab zakat profesi pada umumnya memegang mata kuliah yang berhubungan dengan agama, fikih, tafsir dan terlibat aktif dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memunculkan sikap, perhatian, dan sensitifitas sosialnya memunculkan minat dan motivasi untuk mengkaji dan mendalami persoalan zakat profesi yang terstimulasi dengan sendirinya sehingga menghasilkan buah pemaknaan dan pemikiran mereka terhadap status hukum dan nishab zakat profesi secara mendalam. Sedangkan dosen-dosen yang menyatakan belum mendalami dan memahami tentang zakat profesi menunjukkan bahwa secara internal belum terbangun motivasi atau kepentingan untuk mengkaji lebih jauh persoalan zakat profesi antara lain disebabkan faktor ekonomi keluarga dimana penghasilannya hanya cukup untuk keperluan hidup diri dan keluarga setiap bulannya tanpa kelebihan yang berarti, disamping mereka memandang bahwa konsep zakat maal yang lain pun sudah representatif untuk digunakan sebagai rujukan hukum jika ingin mengeluarkan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi dosen perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang status hukum zakat profesi terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: kelompok pertama (mayoritas dosen) mempunyai persepsi bahwa zakat profesi hukumnya wajib bagi yang mampu atau penghasilannya telah mencapai nishab. Kelompok kedua mempunyai persepsi bahwa zakat profesi masih belum pasti status hukumnya, dengan alasan yaitu masih terdapat kontroversi di kalangan ulama, zakat profesi bukan kewajiban tetapi pilihan. Kelompok ketiga menyatakan tidak mengetahui hukum zakat profesi karena belum melakukan pendalaman kajian terhadap zakat profesi.
2. Persepsi dosen perguruan tinggi Islam di Kota Palangka Raya tentang nishab zakat profesi bervariasi. Kelompok pertama berpandangan bahwa nishab zakat profesi dapat dianalogikan dengan nishab zakat emas setara 85 gram dengan haul. Kelompok kedua berpendapat bahwa nishab zakat profesi itu dianalogikan dengan nishab zakat pertanian dan emas secara bersamaan sehingga dapat ditunaikan kapanpun tanpa terikat haul. Kelompok ketiga setuju zakat profesi dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%, dan kelompok

keempat mempunyai persepsi bahwa nishab zakat profesi itu dianalogikan dengan emas tanpa terikat haul.

B. Saran

Bertolak pada kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan masukan antara lain kepada:

1. Para muballigh/mubalighah di kota Palangka Raya agar lebih gencar mensosialisasikan zakat profesi kepada umat muslim yang memiliki pekerjaan/profesi;
2. Pemerintah kota Palangka Raya sebagai regulator maupun pelaksana agar semakin aktif menyediakan media-media berupa buku, iklan, dan pembinaan-pembinaan kepada para lembaga-lembaga zakat, juru dakwah dan masyarakat muslim terkait zakat maal (termasuk zakat profesi) agar kesadaran berzakat semakin meningkat di kota Palangka Raya;
3. Mengingat mayoritas dosen berpendapat zakat profesi hukumnya wajib, maka direkomendasikan khusus kepada Ketua STAIN Palangka Raya (UM Palangka Raya sudah ada) agar segera membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Palangka Raya untuk menunjang peningkatan perolehan zakat di Kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aflah, Noor, 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia, dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Anshori , Abdul Ghofur, 2006. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, 2002. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku Selayang Pandang Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2013.
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depag RI, 2005. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI.
- DeVito, Joseph. A., 2011. *Komunikasi Antar Manusia*, Alih Bahasa: Agus Maulana, Tangerang: Karisma Publishing.
- Kemenag RI, 2012, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam
- , 2012. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- , 2012. *Buku Saku Menghitung Zakat*, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, 1995. *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, Didin, 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- , 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani.
- Hasan, M. Ali, 1996. *Masalah Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Hasan, M.Ali, 2008. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Hidayat, Yayat, 2008. *Zakat Profesi, Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Bandung : Mulia Press.
- Jalaluddin Rahmat, 2001. *Psikologi Komunikasi(Edisi REvisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartini Kartono, 1991. *Psikologi Umum*, Jakarta: CV Mandar Maju.
- Muhammad, 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Munawwir, Warson, Ahmad. 1997. *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mahmud, Abdul Hamid, 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J., 2002. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Muhsin, MK, 2009. *Manajemen Majelis Taklim*, Jakarta: Pustaka Intermasa.
- Mursyidi, 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurwiyani, Endrati, 2009. *Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung*, Semarang : Universitas Diponegoro.

- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Qardawi, Yūsuf, 1999. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk., Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- , 2005. *Spektrum Zakat, dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rofiq, Ahmad, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 1996. *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Bandung : Al-Ma'arif.
- Sapoetra, G. 1992. *kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, Alwi, 1999. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, 1994. *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Suciaty, Henny, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islaam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Serta Pemanfaatannya di Kota Semarang*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2008.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, Bagong, 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media.
- Tim Penyusun, 2012., *Profil STAIN Palangka Raya Tahun 2011*.
- Yafie, Ali, 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung.
- Yunus, Mahmud, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Hidkarya Agung.
- Zuhayly, Wahbah, 2005. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zuhdi, Masfuk, 1991. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung.

B. Jurnal dan Internet

Asmuni Mth, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Ekonomi Islam, La Riba

<http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/> 18 Januari 2011

<http://blog.its.ac.id/syafii/2009/09/17/hukum-zakat-profesi-yang-tidak-diakui-dalam-jumhur-ahlussunnah-waljamaah-oleh-habib-munzir-al-musawwa/> 20 Januari 2011

<http://bogoyustanto.blogspot.com/2010/09/pengertian-zakat-profesi.html> 19 Januari 2011

http://stainpalangkaraya.ac.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=77 diakses tanggal 7 Desember 2013

<http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/feed/> diakses pada tanggal 8 Desember 2013

<http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf> diakses tanggal 10 Juli 2013